

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama-agama besar seperti Katolik, Budha, Islam, Hindu, Kristen, dan Konghuchu sebelum masuk dan tersebar di Indonesia, masyarakat Indonesia telah mengenal kepercayaan berupa aliran kebatinan yang menyesuaikan dengan adat-istiadat daerahnya. Aliran kepercayaan adalah hasil dari bertemunya berbagai unsur kebudayaan di sepanjang sejarah Indonesia yang kemudian melalui proses akulturasi (Suud 2001) Penganut aliran kepercayaan beranggapan bahwa kepercayaan adalah ‘mistik’, dimana mereka menebus pengetahuan mengenai alam raya dengan cara melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjalin hubungan secara langsung dengan Tuhan. Penganut aliran kepercayaan juga sering kali dikenal dengan istilah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengertiannya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dapat didefinisikan.

Aliran kepercayaan yang semula sempat tergeser oleh agama besar yang diakui di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ada banyak faktor yang menyebabkan kembali meningkatnya aliran kepercayaan di Indonesia, salah satunya yakni pengaruh dari penjajahan di Indonesia. Menurut Selo Sumardjan, ilmu kepercayaan justru akan begitu dirasakan keperluannya saat seseorang mengalami goncangan. Oleh karena itu, pada sekitar tahun 1945 banyak timbul aliran kepercayaan di Indonesia karena masyarakat Indonesia tengah mengalami banyak goncangan karena adanya tekanan jiwa dalam kurun waktu cukup lama pada masa penjajahan (Sumardjan 1970). Ada banyak aliran penghayat kepercayaan di Indonesia, antara lain Supto Darmo, Ngudi Utomo, Sumarah, Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna, Kejawen, Kawruh Bagja, Ugam o Bangsa Batak, dan lain sebagainya. Bahkan menurut pencatatan data dari Direktorat

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2017, terdapat 187 organisasi atau lembaga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dengan jumlah penganut mencapai 12 juta jiwa. Organisasi terbanyak berada di daerah Jawa Tengah dengan jumlah 53 organisasi, dan yang kedua ada di Jawa Timur dengan jumlah 50 organisasi (Data Kemendikbud 2017).

Akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten, selama ini penghayat kepercayaan mengalami cukup banyak diskriminasi. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh Pemerintah. Kemudian, berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik. Dalam hal pekerjaan, di beberapa kasus penganut kepercayaan ini tidak diizinkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut.

Setelah perdebatan yang cukup Panjang mengenai status administrasi tersebut, saat ini organisasi-organisasi Aliran Kepercayaan tersebut telah mendapatkan hak atas mereka sebagai warga Negara. Pada 7 November 2017 lalu, para Penghayat kepercayaan dapat bernafas lega karena telah menang atas gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Hal ini disebabkan oleh karena para penghayat kepercayaan harus mengosongkan kolom agama dalam kartu identitasnya. Dalam suatu negara, salah satu simbol pengakuan dan eksistensi warga negara dibuktikan dengan beberapa hal, salah satunya ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengadaan KTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status baik secara pribadi maupun hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kosongnya kolom agama dalam KTP tersebut dapat mempersulit para penghayat kepercayaan dalam mengakses berbagai hak administrasi sebagai warga negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat

Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi telah menaungi para penghayat kepercayaan dengan adanya organisasi khusus penghayat kepercayaan yang disebut Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Tujuan Kemendikbud adalah untuk memberikan fasilitas dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para Penghayat Kepercayaan, seperti mengenai pendidikan bagi penganut penghayat kepercayaan, catatan sipil, dan hak-hak bernegara seperti masyarakat pemeluk agama pada umumnya.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan putusan MK tersebut. Muncul protes dari berbagai kalangan, termasuk dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pernyataan hasil Rakernas III MUI terkait putusan MK tersebut. Menurut MUI, MK dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia, karena dengan putusan tersebut berarti MK telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.

Di Indonesia terdapat banyak macam aliran yang lahir dan berkembang sesuai dengan adat setempat. Aliran tersebut semakin berkembang seiring dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa. Aliran yang tersebar di pulau Jawa tersebut terbentuk dari penggabungan alam fikir Jawa tradisional yakni filsafat india atau kepercayaan Hindu, serta dari ajaran Tasawuf atau Mistikisme Islam (Satoto 1987). Kota Surabaya yang notabene telah menjadi kota terbesar kedua setelah Ibukota Jakarta, dan masyarakatnya tergolong sudah modern, nyatanya terdapat cukup banyak yang menjadi penganut Aliran Kepercayaan. Tercatat sekitar 35 aliran kepercayaan yang terdaftar di Bakesbangpol, sedangkan yang masuk dalam organisasi MLKI sekitar 22 aliran.

Meski begitu, belum begitu banyak masyarakat yang mengetahui mengenai Penghayat Kepercayaan. Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia di Surabaya biasa mengadakan acara secara bersamaan pada saat Malam Satu Suro di Sanggar Sapto Darmo Indonesia (SDI), yang

kemudian mengadakan ruwatan-ruwatan untuk memperingati tahun baru Islam tersebut.

Topik penelitian ini menarik untuk dikaji karena, pengalaman dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu berbeda-beda. Sehingga pengalaman seseorang tersebut dapat memunculkan perspektif-perspektif baru dalam studi penghayat kepercayaan. Bahkan tidak dipungkiri, adanya aliran kepercayaan lokal ini menjadi sorotan bagi berbagai elemen masyarakat, terutama setelah adanya keputusan untuk melegalkan status penghayat kepercayaan. Beberapa kali para penghayat kepercayaan ini sempat mengalami resistensi dari masyarakat yang menganut Agama. Meskipun mengalami banyak pandangan negatif dari masyarakat mayoritas, namun para penghayat kepercayaan masih memegang teguh kepercayaan mereka bahkan semakin diakui eksistensinya di kalangan masyarakat. Studi ini ingin meneliti mengenai kelompok-kelompok yang sejak Indonesia merdeka keberadaannya dimarjinalkan, salah satunya adalah kelompok penghayat kepercayaan. Kelompok tersebut sudah berjuang dan berhasil mendapatkan hak yang sama di negara, yaitu dengan mengosongkan kolom agama di KTP.

Pengesahan status penghayat kepercayaan secara administratif tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan para pemeluknya. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai perubahan kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan antara sebelum dan setelah pengesahan status administrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga mengulas mengenai upaya penghayat kepercayaan dalam melakukan adaptasi dengan masyarakat sekitarnya, sehingga keberadaan penghayat kepercayaan dapat diterima oleh masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian mengenai Penghayat Kepercayaan di Masyarakat dengan latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana perubahan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan

setelah status penghayat kepercayaan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyesuaikan diri agar diterima oleh masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab fokus penelitian ini yang diantaranya adalah:

1. Mengetahui perubahan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan setelah status penghayat kepercayaan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Mengetahui upaya anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyesuaikan diri agar diterima oleh masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini antara lain:

1. Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas konsep atau teori yang dapat mendukung perkembangan ilmu sosiologi khususnya studi tentang penghayat kepercayaan.
2. Memberikan sumbang ide untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai aliran kepercayaan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, peneliti berharap agar penelitian memberikan sumbangsih kepada pihak terkait dalam memahami kehidupan penganut Penghayat Kepercayaan baik dari segi spiritual maupun kehidupan sosial-budaya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah maupun Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia untuk mengambil kebijakan yang adil bagi penghayat kepercayaan.

1.5 Studi Terdahulu

Berbagai penelitian maupun kajian tentang penghayat kepercayaan telah banyak dilakukan. Hal ini telah melahirkan berbagai macam perspektif dalam menanggapi fenomena penghayat kepercayaan. Dari beberapa hasil temuan penelitian, ada beberapa macam perspektif kajian yang biasa digunakan oleh peneliti untuk mengkaji tentang penghayat kepercayaan ini, diantaranya adalah sosial, dan budaya. Sehingga penjelasan ini dapat menggambarkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta penelitian terdahulu.

1.5.1 Konstruksi Sosial Penghayat Kerohanian Sapta Darma (KSD) dalam Kehidupan Sosial (Studi di Sanggar Agung Candi Busana Sapta Darma Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizal Azis pada tahun 2017 berfokus untuk membahas mengenai bagaimana penghayat kepercayaan mengkonstruksi ajaran Kerohanian Sapta Darma dalam kehidupan sosial, serta membahas bagaimana kondisi religiusitas penghayat Kerohanian Sapta Darma pada kepercayaan awal yang dianut. Hasil penelitian Faizal menunjukkan bahwa:

- 1) Penghayat kepercayaan yang totalitas menganut KSD selama lima tahun memiliki latar belakang agama Kristen. Penghayat tersebut mengkonstruksi agama KSD dalam kehidupan sosialnya dengan cara berperilaku ikhlas dalam menolong, tanpa membedakan latar belakang orang yang ditolong, baik kepada sesama penghayat KSD atau non-penghayat KSD.
- 2) Penghayat yang memiliki dua kepercayaan yaitu KSD dan Hindu yang telah menjadi anggota KSD selama tujuh tahun memiliki latar belakang agama Hindu, ia mengkonstruksi perilaku saling tolong menolong serta dapat menjadi manfaat bagi orang lain;
- 3) Penghayat kepercayaan yang memiliki dua kepercayaan yakni KSD dan agama Islam yang telah menjadi anggota KSD selama dua tahun memiliki latar belakang agama Islam. Ia mengkonstruksi warga KSD harus bersinar bagaikan matahari bagi semua orang;
- 4) Penghayat kepercayaan yang sepenuhnya memeluk KSD dan telah menjadi anggota selama 25 tahun, memiliki latar belakang agama Islam. Ia mengkonstruksi bahwa ajaran KSD mewajibkan warga KSD untuk membantu sesama manusia dan memiliki manfaat bagi orang lain.

Dari segi sosiologis, penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Faizal Aziz program studi Sosiologi Universitas Airlangga. Penelitian yang dilakukan Faizal Aziz ini berfokus untuk membahas mengenai bagaimana para penghayat kepercayaan mengkonstruksi ajaran Kerohanian Sapta Darma dalam kehidupan sosial mereka agar penghayat kepercayaan dapat memiliki ruang untuk serta untuk mengetahui mengenai bagaimana kondisi religiusitas penghayat KSD pada kepercayaan yang dianut.

Dari segi budaya, penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Kustanti yang berjudul “Aliran Kepercayaan Kulowargo Kapribaden di Surakarta”, penelitian ini berfokus untuk membahas apa yang melatarbelakangi berkembangnya aliran Kaluwargo Kapribaden, ajaran apa saja yang ada dalam aliran tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial-budaya dari penganutnya.

1.5.2 Aliran Kepercayaan Kulowargo Kapribaden di Surakarta

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kunstanti, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret pada tahun 2006 yang berjudul Aliran Kepercayaan Kaluwargo Kapribaden di Surakarta, berfokus untuk membahas latar belakang dibentuknya kelompok kepercayaan Kaluwargo Kapribaden serta ajaran-ajaran apa saja yang terkandung dalam kelompok kepercayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana pengaruh dari segi sosial dan budaya atas adanya kepercayaan Kaluwargo Kapribaden tersebut bagi para pemeluknya.

Hasil penelitian dari Kunstanti menunjukkan bahwa: 1) Paguyuban Kaluwargo Kapribaden berdiri pada tanggal 31 Agustus 1975 di Surakarta yang ajaran pertamanya ditemukan oleh Eyang Manguntioso. Melalui beberapa pengikutnya, ajaran Eyang Manguntiso tersebut dikenal dari mulut ke mulut dengan nama ilmu Kapribaden hingga tersebar ke daerah lain seperti Klaten, Prambanan, Semarang, Sragen, serta Jepara. 2) Tuhan ditempatkan menjadi yang utama dalam ajaran di Paguyuban Kaluwargo Kapribaden, dimana Tuhan dianggap sebagai sumber dari segala kehidupan. Paguyuban Kaluwargo

Kapribaden juga mengajarkan mengenai alam semesta, manusia, dan kesempurnaan juga mengenai budi pekerti luhur. 3) Rangkaian kegiatan yang bersifat religi dan sosial sering kali dilakukan oleh Paguyuban Kulowargo Kapribaden. Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan antara lain saling mengunjungi dengan tetangga dan kerabat lainnya, arisan rutin, serta gotong royong yang tujuannya untuk merekatkan tali persaudaraan dan menciptakan suasana kerukunan. Kegiatan religi yang biasa dilakukan oleh Paguyuban Kaluwargo Kapribaden antara lain berupa semedi, halal bi halal, serta sarasehan yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota Kawuruh Kapribaden terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk dapat mendalami lebih jauh mengenai ajaran-ajaran Paguyuban Kaluwargo Kapribaden.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Strukturasi

Sejarah pemikiran ilmu sosial terbentuk dari adanya dua pemikiran besar yang menjadi perdebatan. Anthony Giddens menuliskan buku tentang Teori Strukturasi dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan yang cukup signifikan selama satu setengah dasawarsa yang terjadi pada ilmu-ilmu sosial. Menurut Giddens, terdapat perdebatan diantara dua pemikiran besar dalam ilmu sosial. Giddens memulai pemikirannya dengan mengkritik fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens memberikan kritik mengenai strukturalisme dalam catatannya. Pertama, bagi Giddens teori strukturalis melalui perbedaan dalam proses masyarakat dan konstitusi Bahasa dapat menunjukkan pentingnya penciptaan ruang. Kedua, menurut Giddens pemikiran strukturalis juga mengupayakan untuk memasukkan dimensi waktu ke dalam pusat analisis itu sendiri. Ketiga, pada pemikiran strukturalis dalam beberapa aspek menunjukkan bahwa 'jarak etnografis' sama pentingnya dengan 'jarak dalam waktu'. Keempat, kemungkinan pemahaman yang lebih tentang totalitas sosial juga ditawarkan oleh teori strukturalis daripada penawaran yang diberikan oleh fungsionalisme. Sedangkan dari sisi fungsionalisme, masyarakat bisa dipotret sebagai pola hubungan diantara 'bagian-bagian'. Sedangkan pada teori strukturalis

memunculkan gagasan bahwa masyarakat diibaratkan layaknya bahasa, yang alangkah baiknya dipandang sebagai “sistem maya” dengan sifat berulang. Kelima, menurut Giddens ada upaya gerakan yang digunakan untuk melampaui dualisme subjek/objek dalam teori strukturalisme tersebut (Giddens 2009).

Catatan juga diberikan Giddens pada gagasan Levi-Strauss. Pertama, baginya struktur dimaknai sebagai sebuah model yang dibangun oleh pengamat, dan menurut kata-katanya tidak memiliki sangkut paut dengan dunia empiris. Menurut pendapat Giddens, struktur memiliki “eksistensi maya”. Kedua, kurangnya konsep struktur sebagai strukturasi pada gagasan strukturalisme milik Levi-Strauss tersebut. Ketiga, anggapan struktur sebagai relasi di antara serangkaian unsur atau oposisi simpulan yang digunakan oleh Levi-Strauss tersebut nampak ambigu bagi Giddens. Keempat, gagasan yang digunakan oleh Levi-Strauss mengenai struktur berkaitan dengan kelemahan dasar yang kaitannya dengan penciptaan ruang semantik praksis. Seluruh aturan sosial memiliki ciri transformasional atau dalam pengertiannya dapat disebut bahwa struktur tidak dapat dimanifestasikan ke dalam sesuatu yang empiris, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan sebagai “aturan transformatif”. Kelima, struktur dapat dipastikan meliputi acuan pada fenomena yang amat asing seperti yang dilakukan Straus untuk mengatasi formalism dengan memberikan tekanan pada bentuk sebagai perwujudan dari isi fenomena yang memiliki kaitan dengan kekuasaan apabila struktur hadir (dalam ruang dan waktu) dalam wujud sekilas (Giddens 2009).

Interaksionalisme simbolik di sisi lain juga menitikberatkan pandangannya mengenai kehidupan sosial sebagai prestasi aktif yang dicapai oleh aktor yang memiliki pengetahuan serta tujuan. Seperti yang diuraikan oleh Mead, bahwa sosial bagi kesadaran refleksif yang juga mengaitkan antara interaksionalisme simbolik dengan teori subjek. Ia meyakini bahwa Interaksionalisme simbolik merupakan ‘sosiologi mikro’ yang berkaitan dengan hubungan berskala kecil atau hubungan antar pribadi. Sedangkan fungsionalisme menangani tugas-tugas sosiologi makro yang lebih luas. Menurut Giddens, penjelasan mengenai perilaku manusia yang dipaparkan oleh interaksionalisme simbolik belum memadai.

Baginya, perilaku manusia harus memiliki kaitan dengan teori mengenai subjek yang beraksi serta tidak memperlakukan alasan, tujuan, dan lain sebagainya sebagai suatu yang dihimpun bersama sama, sehingga sebagai arus waktu yang terus mengalir, aksi harus ditempatkan ke dalam ruang dan waktu. Perpaduan antara psikologis dan determinan sosial dapat melahirkan perilaku aktor di dalam masyarakat. Penyikapan tersebut dapat diartikan ketika determinan yang ditujukan kepada unsur-unsur normatif didominasi oleh determinan sosial. Fundamental dari teori strukturasi terbentuk setelah Giddens memahami teori subjek, mencakup tipe stratifikasi kepribadian yang tersusun berdasarkan tiga lapis hubungan, yaitu kesadaran diskursif, kesadaran praktis, serta alam tak sadar (Giddens 2009)

Teori strukturasi merupakan sintesis dari beberapa pemikiran teoritis besar. Sehingga teori strukturasi dianggap merupakan hasil penyempurnaan dari berbagai teori, seperti etnometodologi, fenomenologi, strukturalis, hermeneutic, serta interasionalisme simbolik yang sekaligus memberikan dampak pada rumitnya teori strukturasi. Giddens mengkaji institusi sosial, hakikat tindakan manusia, serta hubungan antara tindakan dan institusi. Setidaknya ada dua fenomena sentral yang hendak dijelaskan berdasarkan gagasan Giddens, yaitu hubungan agensi dan struktur dan sentralitas ruang dan waktu (Wirawan 2012).

Ilmu sosial menurut Giddens telah dijajah oleh gagasan dualisme struktur antara struktur dan pelaku. Berdasarkan deskripsi ilmu sosial struktur dan agensi memiliki hubungan bagaikan pihak yang tengah bertanding satu sama lain (hubungan dualisme). Dengan gagasan hubungan antara struktur dan pelaku sebagai hubungan dualitas, Giddens ingin menggeser paradigma tersebut. Tindakan yang dilakukan agensi dan struktur saling mengandaikan. Agensi menunjuk pada orang konkret dalam tindakan dan peristiwa. Struktur merupakan sumber daya dan aturan yang membentuk dan terbentuk dari keterulangan praktik sosial. Giddens mengungkapkan bahwa dualitas antara agensi dan struktur berada dalam proses dimana struktur sosial merupakan sarana sekaligus hasil dari pembentukan praktik sosial.

Objek utama pada ilmu sosial bagi Giddens bukan merupakan kode tersembunyi seperti yang dikatakan Levi-Strauss dalam strukturalisme, bukanlah peran sosial seperti yang dikatakan Parsons dalam fungsionalisme, bukan pula keunikan-situasional seperti yang dikatakan Goffman dalam interaksionisme. Domain kajian ilmu-ilmu sosial menurut teori strukturasi yaitu praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Artinya, segala aktivitas sosial tersebut terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor dan tidak hanya dihadirkan oleh para aktor sosial. Para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas tersebut di dalam dan melalui aktivitas-aktivitasnya. Konsep dari teori strukturasi berada pada ide-ide mengenai struktur, agen, dualitas struktur, dan sistem (Giddens 2010).

Agen dan Agency (Tindakan)

Ciri dari terus menerus tindakan sehari-hari yang melibatkan tidak hanya perilaku individu namun juga perilaku dari orang-orang lainnya adalah monitoring refleksif aktivitas. Aktor tidak hanya mengharapkan orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan aktivitas apa yang dilakukannya sendiri dan senantiasa memperhatikan atau memonitor arus aktivitas orang lain. Aspek lain baik fisik maupun sosial tempat Bergeraknya sendiri juga rutin dimonitor. Untuk menjadi agen-agen sosial yang sesungguhnya, semua aktor sosial harus menjadi teoritis sosial. Terdapat dua hal yang menjadi kontribusi khas dari fenomenologi.

Pertama, kegiatan berteori terus menerus dilibatkan dalam beroperasinya kehidupan sosial. Kedua, bahkan perhatian refleksif yang terus menerus dan mendetail sekalipun turut dilibatkan dalam norma-norma yang paling mapan atau kebiasaan-kebiasaan yang paling bertahan lama. Semua rutinitas merupakan pencapaian yang memiliki potensi tinggi untuk hancur dan selalu tidak dapat dipastikan, namun hal tersebut merupakan elemen yang paling penting dalam kehidupan sosial (Giddens 2009).

Gagasan Freud mengenai tiga dimensi internal manusia (ego, dan super-ego) menjadi dasar Giddens dalam mengajukan model susunan pelaku tindakan.

Mengacu pada tiga dimensi internal manusia yang digagas oleh Freud tersebut, Giddens mengolahnya menjadi tiga unsur dalam diri manusia, yakni kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), motivasi tak sadar (*unconscious motive*), dan kesadaran praktis (*practical consciousness*) (Giddens 2010).

Kapasitas seseorang dalam merefleksi dan memberi penjelasan atas tindakan yang dilakukannya menjadi acuan dari kesadaran diskursif. Apabila seseorang ditanya mengapa ia melakukan tindakan tersebut, maka seseorang tersebut akan menjawab dengan skema aturan tertentu penjelasan berdasarkan tindakan yang kita lakukan secara sadar. Keinginan pelaku yang merupakan potensi tindakan menjadi acuan dari motivasi tak sadar, namun tindakan tersebut tidaklah sendiri. Hal tersebut menjadi penyebab motivasi yang sadar jarang menggerakkan tindakan seseorang secara langsung. Adapun kawasan diri pelaku yang berisi berbagai pengetahuan praktis dan tidak selalu dapat diuraikan secara eksplisit adalah kesadaran praktis. Level hidup yang merupakan kawasan insting hidup yang sangat jarang kita pertanyakan lagi dan berisi tentang pengetahuan yang diandaikan berada dalam kawasan kesadaran praktis. Sebagai contohnya, seseorang hampir tidak pernah menanyakan tentang mengapa seseorang seseorang menangis waktu sedih, mengapa seseorang tertawa saat senang dan lain sebagainya (Wirawan 2012).

Hanya berdasarkan maksud-maksud tertentu agensi manusia dapat ditetapkan. Siapa saja yang melakukan sebuah perilaku harus memiliki maksud dalam melakukan tindakan tersebut, tujuannya agar sebuah perilaku bisa dianggap sebagai tindakan. Apabila tidak, maka perilaku itu hanyalah sekedar respons reaktif semata (Giddens 2010).

Sedangkan struktur, diartikan oleh Giddens sebagai sebuah aturan atau sumber daya, dalam konsepsi teori strukturasi oleh Giddens, pengesahan status penghayat kepercayaan oleh MK dapat dipahami legitimasi sebagai salah satu dimensi struktur. Peraturan tersebut menjadi media terjadinya praktik sosial sebagai agen dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak hanya menjadi aturan tertulis.

Permasalahan yang muncul ketika tidak ada kesesuaian pemahaman antara masyarakat penganut penghayat kepercayaan dengan masyarakat non-penganut penghayat kepercayaan mengenai pengesahan status penghayat kepercayaan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi diperburuk dengan peran pemerintah daerah yang masih kurang pengetahuannya mengenai pengesahan status tersebut di mata negara, sekaligus melakukan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat awam non-pemerintahan. Kesadaran atau pemahaman akan pengesahan tersebut akan menentukan persepsi dan penyikapan masyarakat umum terhadap penghayat kepercayaan.

Pola relasi antara penghayat kepercayaan dengan masyarakat non-penghayat ditentukan oleh kesadaran masing-masing terhadap adanya peraturan baru mengenai penghayat kepercayaan dan pola relasi yang dibangun oleh kedua belah pihak. Pola relasi tersebut dapat dilihat sebagai suatu bentuk praktik sosial. Relasi yang terjalin antara penghayat kepercayaan dengan masyarakat non-penghayat kepercayaan dapat dilihat dalam kerangka struktur-agen. Peraturan mengenai pengesahan status penghayat kepercayaan di mata negara tersebut, dalam konsepsi strukturasi dipandang sebagai struktur sosial yang bersifat melintasi ruang dan waktu, berdampak pada hubungan antar masyarakat, serta pemerintah, dimana adanya peraturan tersebut harusnya menjadi salah satu usaha untuk menyatukan persepsi, pemahaman, dan penyesuaian dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam. Hal tersebut terjadi karena setiap agen memiliki dimensi struktur pengetahuan sendiri dan melahirkan cara praktik yang berbeda.

Proses legitimasi meliputi norma-norma serta peraturan tertulis yang menyebabkan penghayat kepercayaan memperoleh kepercayaan masyarakat karena telah memiliki lisensi atau pengesahan status kepercayaannya. Dalam hal ini, masyarakat penghayat kepercayaan yang kerap kali dipandang menyimpang oleh masyarakat non-penghayat kepercayaan, kemudian mulai disetarakan dengan adanya pengesahan status penghayat kepercayaan di mata negara oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga masyarakat yang sebelumnya menganggap penghayat

kepercayaan sebagai sebuah penyimpangan, diharapkan akan semakin diterima di tengah-tengah masyarakat.

Dualitas Struktur

Para strukturalis dan post strukturalis menggambarkan struktur sebagai perpotongan antara kehadiran dan ketidakhadiran. Sedangkan teoritis fungsionalisme cenderung mengartikan struktur sebagai pola hubungan sosial ataupun fenomena sosial. Dalam menganalisis hubungan sosial, hendaknya dibedakan antara dimensi “*syntagmatics*”, yaitu permulaan hubungan sosial dalam ruang dan waktu yang melibatkan reproduksi praktik-praktik sosial, dan dimensi “*paradigmatic*”, yaitu aturan “*modes of structuring*” yang ada dalam reproduksi tersebut. Struktur diartikan sebagai peraturan dan sumber daya dalam teori strukturasi. Struktur dianggap sebagai penstrukturan sifat-sifat yang memungkinkan pengikatan ruang dan waktu dalam sistem sosial, sifat yang memungkinkan praktik sosial sejenis ada pada berbagai ruang dan waktu, serta memberikan bentuk sistematis (Giddens 2009).

Pada dasarnya, dalam teori strukturasi ini Giddens menolak agensi dan struktur, dualisme subjek dan objek, serta struktur dan proses, yang selama ini dipandang sebagai dualisme oleh Giddens yang kemudian dikoreksi sehingga memunculkan istilah dualitas. Pada dasarnya, Dualitas struktur memandang individu aktor dan struktur tersebut saling berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi hubungan-hubungan sosial institusi. Hal ini dapat diartikan bahwa aktor merupakan hasil (*outcome*) dari struktur, namun aktor juga merupakan reaksi bagi pembentukan struktur baru. Giddens memandang struktur itu sendiri sebagai sumber daya dan peraturan yang secara berulang terlibat dalam reproduksi sistem sosial. Struktur hanya hadir sebagai landasan organik bagi pengetahuan manusia, jejak memori, dan yang terwujud dalam aksi (Giddens 2009).

Dalam pandangan Giddens, struktur serupa dengan skema yang bersarang dalam memori kita mengatasi waktu dan ruang, sehingga tidak kasat mata dan hanya tampak dalam praktik-praktik sosial. Struktur berupa skema mirip “aturan” yang menjadi prinsip berlangsungnya praktik-praktik sosial. Menurut Wirawan,

struktur berisi sumber daya dan peraturan yang akan memberi peluang serta kendala bagi aktor untuk bertindak. Kemudian berdasarkan sumber daya dan peraturan tersebut, aktor akan kembali menghasilkan hubungan-hubungan sosial (struktur) dan institusi dalam masyarakat. Penting dicatat bahwa struktur tidak hanya menimbulkan kendala bagi tindakan manusia, tetapi juga menimbulkan peluang bagi manusia untuk bertindak atas kehendak sendiri. Pada tingkatan tertentu, kendala tersebut membatasi tindakan, tetapi dalam tingkatan lain kendala justru membuka peluang bagi individu untuk bertindak (Surbakti 1995).

Secara operasional, menurut Giddens struktur merupakan hal yang melahirkan sumber daya dan aturan, hal tersebut dapat dijabarkan ke dalam tiga bentuk kendala. Pertama, semua tipe peraturan yang digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh aktor, serta benda yang dapat dihasilkannya. Fungsi dari peraturan yang bersifat semantik tersebut adalah sebagai komunikasi makna. Bentuk yang pertama tersebut merupakan unsur-unsur struktural, seperti dimensi politik dan tata simbol, hukum, serta ekonomi. Bagi individu-aktor, hal tersebut merupakan kendala objektif. Kedua, untuk mengevaluasi tingkah laku, aktor menggunakan semua tipe peraturan sebagai norma. Kendala tersebut dapat disebut sebagai sanksi-sanksi negatif terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan struktur. Ketiga, sumber daya material dan non material, serta semua fasilitas mulai dari penguasaan keterampilan berbicara sampai pada penerapan sarana-sarana kekerasan, mungkin digunakan oleh aktor dalam suatu interaksi. Sumber daya tersebut akan memberikan kemampuan melakukan transformasi (kekuasaan). Namun, akses terhadap kekuasaan tersebut berbeda-beda setiap orang atau akses setiap orang tidaklah sama. Kemampuan aktor memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang berarti dibatasi oleh perbedaan akses terhadap kekuasaan tersebut (Wirawan 2012).

Strukturasi merupakan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu dari sudut dualitas struktur. Menurut teori strukturasi, masa produksi aksi adalah juga masa reproduksi di dalam konteks penerapan kehidupan sehari-hari. Di dalam

memproduksi sifat-sifat structural, para agen juga mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan aksi tersebut dilakukan. Agen selalu mengetahui apa yang mereka lakukan pada tingkat kesadaran diskursif di bawah deskripsi tertentu, tetapi mereka mungkin tidak dapat memahami apa yang mereka lakukan di bawah deskripsi lain.

Konsep Ruang dan Waktu

Ruang dan waktu secara integral turut membentuk kegiatan sosial menurut Giddens, sehingga ruang dan waktu dikorporasikan oleh teori strukturasi dalam jantung teori sosial. Jadi bukan sekedar fisik melainkan ruang sosial (*social space*) yang dimaksud dengan ruang (*space*) disini, yakni interaksi manusia dengan ruang fisik, seperti perkotaan dan pedesaan, tempat tinggal dan tempat kerja, pasar swalayan besar dan pasar tradisional, atau kantor birokrasi dan kampus. Kemudian, bukan sekedar sejarah kronologis yang dimaksud dengan waktu (*time*) disini, melainkan peristiwa masa lalu yang dijadikan pengalaman belajar. Giddens melihat kegiatan sosial “mencengkeram ruang dan waktu” serta berada pada akar pembentukan, baik subjek maupun objek. Rutinitas merupakan salah satu konsep fundamental dari teori strukturasi. Karena dasar kegiatan sosial hari demi hari adalah sesuatu yang rutin. Istilah “hari demi hari” mengungkapkan sifat rutinisasi yang diperoleh dalam kegiatan sosial yang terentang melewati ruang dan waktu. Giddens cenderung lebih menggunakan konsep “memposisikan diri” dari pada istilah status untuk memahami istilah ruang. Hal disebabkan oleh status konotasinya yang lebih bersifat statis, sedangkan Giddens mempersoalkan segi proses yang sifatnya dinamis (Giddens 2010).

Dalam mengkaji ruang dan waktu dalam teori strukturasi, konsep perentangan waktu perlu juga mendapat perhatian. *Time space distancing* menurut Giddens dimaknai sebagai “merentangkan sistem-sistem sosial melintasi ruang dan waktu, atas dasar integrasi sistem dan mekanisme sistem sosial”. Integrasi sistem dalam konteks ini dimaknai sebagai hubungan timbal balik antarpelaku individual atau kelompok dalam rentang ruang-waktu yang diperluas, di luar kehadiran satu sama lain. Semakin tahan (*resistant*) terhadap perubahan

oleh pelaku individual, maka semakin luas pula jangkauan perentangan ruang-waktu suatu sistem sosial tersebut tertanam dalam ruang dan waktu (Wirawan 2012).

Peristiwa empiris terdistribusi mengacu berdasarkan ruang dan waktu yang dapat diartikan setiap institusi dan hubungan-hubungan sosial berlangsung dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Interaksi sosial tidak hanya dibentuk dan berlangsung di dalam ruang dan waktu sebagai lingkungan eksternal, namun bagi hubungan-hubungan sosial ruang-waktu itu juga menjadi internal karena telah memberi makna sosial bagi interaksi tersebut.

Ruang dan waktu ada kalanya menjadi kendala bagi individu untuk bertindak atas kehendak bebas, namun ada kalanya pula hal tersebut justru memberikan kemungkinan bagi individu untuk bertindak sebagai subjek. Karena itu mungkin saja aktor memiliki pengetahuan, orientasi, dan kemampuan untuk bertindak sebagai subjek yang memiliki kehendak bebas. Konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ruang dan waktu menjadi dorongan untuk melakukan perlawanan, oposisi, otonomi maupun perasaan diperlakukan secara tidak adil.

Konsep Kekuasaan Power

Giddens melihat tiga gugus besar struktur dari berbagai prinsip struktural. Pertama, struktur signifikansi menyangkut wacana, penyebutan, dan skema simbolis. Tanda hanya hadir jika diproduksi dan direproduksi dalam makna. Sifat-sifat struktural sistem sosial, yang digali dan direproduksi oleh para aktor dalam bentuk pola interpretative menjadi rujukan bagi makna. Kedua, struktur dominasi yang menyangkut skemata penguasaan atas barang (ekonomi) dan orang (politik). Sumber daya yang membentuk struktur dominasi yang direproduksi sebagai relasi kekuasaan terbagi menjadi dua jenis, yakni alokasi dan otorisasi. Maksud dari alokasi merujuk pada kemampuan yang menimbulkan penguasaan atas benda, sedangkan otorisasi adalah kemampuan memunculkan perintah atas orang. Ketiga, struktur legitimasi menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Giddens 2012).

1.6.2 Teori Anomie

Anomie merupakan sebuah kata yang digunakan dalam penggambaran suatu ketidak selarasan keadaan yang berupa kekacauan bebas. Teori anomie muncul diakibatkan adanya kondisi dimana munculnya satu titik dalam masyarakat yang tidak mampu menerima atau memberikan respon kepada individu atau kelompok yang sedang mengupayakan asimiliasi. Tindakan tersebut merupakan timbal balik yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk kelompok masyarakat yang sedang berada dalam proses pengenalan atau invasi terhadap konsep atau bentuk kebudayaan baru. Berdasarkan hal tersebut, respon yang menjadi tidak selaras diantara masyarakat dengan individu atau kelompok baru memunculkan kondisi yang dikenal sebagai “ketiadaan norma”.

Ketiadaan norma menjadi hal yang dapat terjadi, dalam kasus tertentu, anomie dapat diartikan sebagai sebuah keinginan dari kelompok yang tidak dapat terpuaskan oleh masyarakat, dimana hal tersebut dapat berarti respon atau timbal balik. Konsep anomie dimunculkan dan dikembangkan dari konflik yang dimunculkan akibat adanya sistem kepercayaan yang mempengaruhi tatanan sosial diantara individu dan masyarakat.

Konsep anomie pertama kali muncul pada tahun 1893 oleh Emile Durkheim yang dikenal dengan kata “kekacauan” yang kemudian dikembangkan oleh Robert K Merton pada tahun 1938 dengan sudut pandang terhadap struktur sosial. Pada awalnya, anomie muncul dalam mendeskripsikan tentang perubahan yang muncul dalam kelompok pekerja, dimana fenomena yang terkait merupakan kehilangan norma diantara solidaritas pekerja. Kemudian anomie digunakan oleh Robert K Merton yang beranggapan bahwa struktur yang tidak terintegrasi dengan budaya akan menyebabkan hilangnya fungsi masyarakat dan menyebabkan adanya *deviance* atau penyimpangan norma dalam masyarakat. Anomie juga dapat dipengaruhi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi dalam struktural masyarakat. Konsep anomie merupakan konsep yang sangat dikenal dengan penggambaran kekacauan yang diciptakan dari perubahan secara cepat dalam nilai dan norma masyarakat. Pandangan anomie sering terlihat dalam agama tradisional

atau penganut kepercayaan yang mendasari nilai kebersamaan dan kebudayaan yang mana tidak dimiliki atau diserap oleh individu yang sedang dalam tahap anomie. Robert K Merton memunculkan anomie dalam definisinya sebagai sebuah kekacauan di antara tujuan sosial dan langkah yang digunakan kelompok tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan munculnya usaha yang dipaksakan bagi individu tersebut dalam mencapai tujuan namun hal tersebut terbatas oleh struktur masyarakat sehingga muncul kesenjangan di antara kedua pihak tersebut.

Analisa yang dilakukan oleh Merton menghasilkan lima model adaptasi yang muncul akibat pola tindakan dari kesenjangan tersebut. Model tersebut merupakan kesimpulan dari karakteristik kelompok dalam kesenjangan sosial yang bervariasi. Model tersebut terbagi menjadi tiga tipe adaptasi, (+) mewakili penerimaan, (-) berarti penolakan atau eliminasi, dan (+) mewakili penerimaan dengan syarat atau adaptasi (Merton 1938).

	Culture Goals	Institutionalized Means
I. Conformity	+	+
II. Innovation	+	-
III. Ritualism	-	+
IV. Retreatism	-	-
<hr/>		
V. Rebellion ¹⁹	±	±

Dari pendapat Merton di atas menjelaskan lima jenis pola adaptasi sosial individu terhadap situasi tertentu, diantaranya:

1. Bentuk adaptasi konformitas (*conformity*). Adaptasi ini menjelaskan bahwa cara dan tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat sepenuhnya diikuti dan berdampak pada perilaku seseorang.
2. Bentuk adaptasi inovasi (*innovation*). Adaptasi ini menjelaskan bahwa tujuan dari masyarakat menjadi acuan bagi perilaku seseorang, namun seseorang tersebut menggunakan cara yang tidak sama atau berbeda dengan masyarakat.
3. Bentuk adaptasi ritualisme (*ritualism*). Adaptasi ini menjelaskan bahwa tujuan dari masyarakat sudah tidak lagi menjadi acuan dari perilaku

seseorang, namun seseorang tersebut tetap berpegang teguh pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

4. Bentuk adaptasi retreatisme (*retreatism*). Adaptasi ini menjelaskan bahwa aturan dan cara yang dikehendaki oleh masyarakat tidak menjadi acuan dari perilaku seseorang tersebut.
5. Bentuk adaptasi pemberontakan (*rebellion*). Adaptasi ini menjelaskan bahwa, seseorang berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang baru dan tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada. Seseorang tersebut menganggap bahwa tujuan budaya yang ada merupakan penghalang dari tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga tidak diakui.

1.6.3 Teori Looking Glass-self

Charles Horton Cooley merupakan salah satu tokoh penting sosiologi yang lahir di Ann Arbor, Mich pada tanggal 17 Agustus 1864. Sepanjang karirnya Cooley telah banyak menghasilkan karya yang cukup monumental dan kontributif di bidang sosiologi dan psikologi. Ia telah menghasilkan karya antara lain seperti *Human Nature and The Social Order* (1902), *Social Organization* (1909) dan *Social Process* (1918).

Ketika ia lulus dari Universitas Michigan tahun 1887, karir Cooley dapat dikatakan cukup cemerlang, lalu pada tahun 1889 Cooley mulai bekerja di bidang pemerintahan di Komisi Pelayanan Sipil dan Biro Sensus. Di dunia akademis, Cooley kemudian melabuhkan dirinya dan ia mulai mengajar pada ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik dan ekonomi (1892-1904) dan sosiologi (1904-1929). Pandangannya menjadi inspirasi terhadap bangunan teori selanjutnya seperti teori interaksionalisme simbolik, hal tersebut banyak mempengaruhi perkembangan teori-teori sesudahnya.

Cooley berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai individu, bukan sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat. “Diri” didefinisikan oleh tokoh penting dalam perkembangan ilmu interaksi simbolik ini sebagai segala sesuatu yang dirujuk dalam pembicaraan biasa melalui kata ganti

orang pertama tunggal. Cooley berpendapat bahwa “aku” (*I*), “daku”, (*me*), “milikku”, (*mine*), dan “diriku” (*myself*). Menurutnya, segala sesuatu yang dikaitkan dengan diri menciptakan emosi lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak dikaitkan dengan diri bahwa diri dapat dikenal hanya melalui perasaan subjektif. Cooley mendefinisikan konsep tersebut sebagai suatu imajinasi yang cukup pasti mengenai bagaimana diri seseorang dapat memiliki ide apapun yang sesuai dengan dirinya tampak di dalam suatu pikiran khusus, dan jenis perasaan diri yang dimiliki seseorang ditentukan oleh sikap ke arah ide tersebut yang ditujukan ke pikiran lain.

Jadi, di dalam imajinasi kita merasakan di dalam pikiran orang lain suatu pemikiran atas penampilan kita, kelakuan kita, tujuan-tujuan kita, perbuatan-perbuatan kita, karakter kita, teman-teman kita, dan seterusnya, dan dipengaruhi olehnya secara bervariasi. Cooley berargumen bahwa konsep diri individu secara signifikan ditentukan apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang lain mengenai dirinya. Artinya, individu memerlukan respons orang lain yang ditafsirkan subjektif sebagai data dirinya. Terdapat tahapan seseorang dalam berfikir yang disampaikan oleh Cooley mengenai *looking glass-self* (Ritzer & Goodman 2003).

1. Membayangkan bagaimana diri kita tampak pada orang lain. Dalam tahap ini seseorang akan membayangkan bagaimana pemikiran orang lain atas dirinya. Misalnya membayangkan orang lain telah berpikir dan beranggapan bahwa diri kita ramah.
2. Kita membayangkan apa yang mereka pertimbangkan atas penampilan kita yang seharusnya. Dalam tahap ini seseorang akan membayangkan faktor-faktor yang dapat mendukung dan tidak mendukung apa yang orang lain pikirkan mengenai kita. Misalnya, membayangkan mengenai ‘yang dapat disebut ramah itu bagaimana.’
3. Kita mengembangkan suatu perasaan-diri, seperti kebanggaan atau rasa malu, sebagai hasil dari imajinasi kita atas pertimbangan-pertimbangan

orang lain. Dalam tahap ini seseorang akan menyusun respon atas pertimbangan-pertimbangan yang diimajinasikan orang lain atas dirinya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dan dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjuk pada segi “amanah”, maka dari itu dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada melalui ungkapan yang diperoleh berdasarkan kehidupan sehari-hari individu tersebut secara rinci. Selain itu juga ingin menjawab pertanyaan mengenai apa yang melatar belakangi para akademisi menjadi seorang penghayat kepercayaan, serta bagaimana dampaknya bagi kehidupan sosial budaya informan. Oleh karena jawaban dari fokus penelitian tersebut akan mengalami diversitas yang sangat beragam sehingga data yang diperoleh mengenai keikutsertaan akademisi sebagai penghayat kepercayaan juga akan bervariasi, maka peneliti mengusulkan untuk menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis realitas tersebut.

1.7.2 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menentukan informan sebagai sumber data dengan mengacu pada azas subyek yang bersedia memberikan informasi yang lengkap, memiliki data, dan menguasai permasalahan pada penelitian ini. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang

ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menentukan informan atau subjek penelitian menggunakan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan sifat yang bisa diketahui sebelumnya. Selain menggunakan metode, penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah mengalami kondisi jenuh dimana tidak adanya lagi variasi dari data yang diperoleh.

Sesuai dengan topik penelitian ini, subyek penelitian dalam ini adalah seseorang yang menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Selain itu, informan yang akan diteliti yakni seorang penghayat yang menjadi salah seorang pengurus aliran kepercayaan atau yang menjadi Pembina Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Jawa Timur.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. *Indepth Interview* / Wawancara mendalam

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara jelas

mengenai apa alasan yang menjadikan akademisi menjadi seorang penghayat kepercayaan. Selain itu lokasi dan waktu dilakukannya wawancara disesuaikan dengan keinginan informan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan yang menjadi seorang penghayat kepercayaan di Kota Surabaya. Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau informasi dari informan secara langsung untuk proses pengolahan selanjutnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik dari sumber data serta informasi yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian akademisi yang memilih aliran kepercayaan sebagai kepercayaan.

1.7.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan dari data-data yang diperoleh selama penelitian, baik itu berupa data primer yakni observasi, *life history* maupun data sekunder yakni studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan metode *scaling measurement*, *empirical generalization*, dan *logical induction*. *Scaling measurement* adalah tahap awal dalam mengolah data kualitatif dimana ada transkrip yang didapatkan dari observasi lapangan hingga *life history* yang ditulis dengan menggunakan bahasa asli sesuai hasil yang dibicarakan (bahasa daerah, bahasa asing, umpatan, dll) lalu dalam tahap ini terdapat kategorisasi data melalui tiga kategori yaitu *personal file*, *analisis file*, dan *proses file*. Selanjutnya adalah *empirical generalization*, yaitu tahap analisis terhadap transkrip guna menangkap makna dari teks untuk menunjukkan “makna dominan” dari hasil wawancara dan

observasi. Hingga yang terakhir adalah *logical induction* yaitu mencari pemahaman terhadap realitas sosial yang dikaji dan interpretasi perkataan dan tingkah laku subjek pada saat penelitian berlangsung hingga akhirnya dihasilkan sebuah hipotesis atau preposisi yang baru.